



Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi

Political Elites in Indonesia: The Roots and Impact of Misuse of Democratic Rights

¹⁾ Maysarah Harahap, ²⁾ Ruth Nadya, ³⁾ Winanda Sitanggang, ⁴⁾ Jamaludin

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Email: ¹⁾ maysarahjesicaayu@gmail.com, ²⁾ ruthnadya01@gmail.com, ³⁾ winandasitanggang2002@gmail.com,
⁴⁾ jamaludin@unimed.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Maysarah Harahap

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.1023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran elite politik dalam demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu faktor utama munculnya suatu krisis demokrasi. Peran dan perilaku elite politik adalah aspek yang terus menjadi perhatian dalam dinamika politik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik Indonesia, mengidentifikasi akar masalah penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik, dan menganalisis dampak yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi literatur (kepuustakaan). Hasil temuan yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa krisis ini dapat merusak kepercayaan publik, ketegangan sosial, bahkan memicu terjadinya ketidakstabilan politik. Ini diakibatkan karena pelaku elite politik yang menggunakan kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip berdemokrasi. Untuk mengatasi krisis demokrasi ini, diperlukan upaya-upaya yang kuat agar nantinya demokrasi di Indonesia dapat mencerminkan nilai nilai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengawasi tindakan elite politik, menuntut akuntabilitas mereka, dan aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Kata kunci: Demokrasi, Elite Politik, Krisis Demokrasi

ABSTRACT

This research discusses the role of political elites in democracy in Indonesia which is one of the main factors in the emergence of a democratic crisis. The role and behavior of the political elite is an aspect that continues to be a concern in the dynamics of Indonesian politics. This research aims to provide a better understanding of Indonesia's political dynamics, identify the root causes of abuse of democratic rights by political elites, and analyze the resulting impact. The method used in this research is by means of literature study (literature). The findings obtained in this study show that this crisis can damage public trust, social tensions, and even trigger political instability. This is due to the perpetrators of the political elite who use power that is not in accordance with democratic principles. To overcome this democratic crisis, strong efforts are needed so that later democracy in Indonesia can reflect values. Therefore, it is important for society to supervise the actions of political elites, hold them accountable, and actively participate in the political process to maintain sound democratic principles.

Keywords: *democracy, political elite, crisis of democracy*



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia dengan populasi yang mencapai lebih dari 270 juta orang (Arif & Nurwati, 2022), telah mengalami sejumlah perkembangan politik yang signifikan sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Salah satu aspek yang terus menjadi perhatian dalam dinamika politik Indonesia adalah peran dan perilaku "*elite politik*."

Elite politik merujuk pada kelompok-kelompok elit yang memiliki pengaruh politik yang kuat dan seringkali berperan dalam pengambilan keputusan pemerintah (Subianto, 2020). Mereka adalah tokoh-tokoh politik, pejabat tinggi, pemilik modal, dan individu-individu lain yang memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan politik dan sumber daya negara (Harahap, 2017). Elite politik memainkan peran kunci dalam membentuk arah dan kebijakan negara, serta dalam mengawasi proses demokrasi (Budiatri et al., 2018).

Namun, dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia juga menghadapi tantangan serius terkait penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik (Wingarta et al., 2021). Ini mencakup berbagai tindakan seperti korupsi, nepotisme, kolusi, dan praktik-praktik politik yang tidak etis. Penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik telah berdampak negatif pada stabilitas politik, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat (Rofidah, 2017).

Penting untuk memahami akar dari penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik di Indonesia. Ini mencakup aspek-aspek seperti struktur politik, budaya politik, faktor-faktor sejarah, dan dinamika kekuasaan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan ini. Dalam konteks ini, analisis mendalam tentang dinamika politik dan peran yang dimainkan oleh berbagai elemen dalam elite politik sangat penting untuk mengungkap akar masalah ini.

Selain itu, penting juga untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik terhadap masyarakat Indonesia. Dampak tersebut bisa meliputi ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakstabilan politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan dampak ekonomi negatif. Studi yang cermat tentang dampak ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang mengapa perbaikan dalam sistem politik dan perilaku elite politik sangat diperlukan.

Tujuan penelitian dari penelitian ini untuk menggali akar permasalahan yang mendorong penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik, mendeskripsikan dampak yang timbul akibat penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik terhadap masyarakat Indonesia dan menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang perlunya perbaikan dalam sistem politik dan perilaku elite politik untuk mencapai tujuan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia. Sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia dengan populasi yang sangat besar, Indonesia telah mengalami perkembangan politik yang signifikan sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Oleh karena itu, memahami dinamika politik dan peran elite politik adalah sangat penting untuk mendukung perkembangan demokrasi di negara ini, penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik berpotensi mengakibatkan dampak serius pada masyarakat, termasuk ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakstabilan politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan dampak ekonomi negatif. Memahami dampak ini secara cermat akan membantu mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang akar masalah dan dampak penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik, dan ini penting dalam konteks upaya untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia. Langkah pertama untuk mencapai demokrasi yang lebih kuat dan inklusif adalah dengan memahami masalah yang perlu diperbaiki untuk menjelaskan kompleksitas dinamika politik Indonesia, mengidentifikasi masalah utama penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik, dan

menganalisis dampak yang dihasilkan. Keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa kekuasaan politik benar-benar melayani kepentingan rakyat secara adil dan transparan.

Dengan demikian, dari materi "Elite Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi," bertujuan untuk menjelaskan kompleksitas dinamika politik Indonesia, menggali akar permasalahan penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik, dan menggambarkan dampak yang muncul sebagai konsekuensinya. Ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem politik Indonesia dapat diperbaiki untuk mencapai tujuan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur atau literature review. Metode studi literatur adalah serangkaian proses yang terkait dengan pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, membaca dan membuat catatan, serta mengelola materi penelitian tersebut. Peneliti melakukan dengan cara mencari berbagai sumber informasi yaitu dari beberapa buku, jurnal, dan mengunjungi beberapa situs website yang membantu mencari berbagai informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu konsep demokrasi adalah bahwa kedaulatan berada dalam kekuasaan rakyat. Sementara itu, banyak ahli menyatakan pentingnya demokrasi dalam pernyataan mereka dan, yang terpenting, berpendapat bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat (Damanik & Lubis, 2022) (RAFLI, 2022). Anda pasti sudah familiar dengan pemerintahan demokratis karena Indonesia juga mempunyai sistem pemerintahan demokratis yaitu demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi sangatlah beragam. Dimana titik utama demokrasi adalah rakyat dalam pemerintahan. Secara etimologi, demokrasi bersumber dari bahasa Yunani Kuno, terdiri dari "demos" yang berarti rakyat dan "kratein" yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, secara bahasa, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi merujuk pada model kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup pemerintahan yang mendukung dan menjamin hak untuk berbicara, beragama, berpendapat, berkumpul, dan mendorong pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas. Selain itu, demokrasi juga menekankan pentingnya rule of law (prinsip supremasi hukum) dan prinsip kesetaraan perlakuan di antara warga negara (Syahdiono, 2022). Pengertian tersebut pada dasarnya mengacu pada pernyataan Abraham Lincoln, seorang mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyampaikan, "Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, diperintah oleh rakyat, dan untuk rakyat" (*the government from the people, by the people, and for the people*). (Gunawan, 2019). Metode demokrasi adalah suatu pengaturan kelembagaan untuk pengambilan keputusan politik dimana rakyat memperoleh kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui persaingan untuk mendapatkan suara dari rakyat." (Metode demokratis adalah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana setiap orang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan pengambilan keputusan melalui kompetisi untuk memenangkan suara terbanyak). (Schumpeter, 1950).

Adapun pendapat lain tentang arti demokrasi menurut para ahli mengenai makna demokrasi:

1. Menurut H. Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk bersatu, membela diri, dan melindungi diri dari tindakan wakil-wakil mereka yang berkuasa.
2. Charles Costello menggambarkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan sosial dan politik yang independen, dengan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan adat istiadat untuk menjaga hak-hak individu warga negara.
3. Kait Sidney, dalam pandangannya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada persetujuan sukarela mayoritas warga dewasa.
4. K.F. Stark mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang kuat, di mana mayoritas anggota parlemen berasal dari masyarakat dan berpartisipasi dalam proses politik melalui perwakilan.

Jadi, demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintahan ada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, kekuasaan atau pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil mereka yang dipilih berdasarkan sistem pemilihan umum yang bebas.

Prinsip Prinsip Demokrasi

Warga negara memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam politik dan kebijakan sosial. Prinsip-prinsip demokrasi dan persyaratan untuk mendirikan negara demokrasi dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kasih, 2018).

Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam pernyataan Presiden Al-Maududi yang sering disebut sebagai "dasar-dasar demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

- a. Kedaulatan rakyat
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah
- c. Kekuasaan mayoritas
- d. Perlindungan hak-hak minoritas
- e. Jaminan hak asasi manusia
- f. Pemilihan yang bebas dan jujur
- g. Kesetaraan di mata hukum
- h. Proses hukum yang adil
- i. Pembatasan pemerintah sesuai konstitusi
- j. Pluralisme dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik
- k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat
- l. Distribusi pendapatan yang adil

Dalam negara demokrasi, semua sektor dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Secara esensial, suatu negara dapat dianggap demokratis jika dalam sistem pemerintahannya, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menikmati kesetaraan di mata hukum, dan menerima pendapatan yang pantas melalui distribusi pendapatan yang adil (Hutabarat et al., 2021) (Nurwandi, 2016: 172-173). Berikut penjelasan dari pernyataan di atas:

A. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Dalam negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan politik dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat. Aspirasi dan tujuan rakyat harus diwujudkan, dan tatanan politik harus tunduk pada konstitusi yang menetapkan arah dan prinsip-prinsip

kehidupan berbangsa. Pengambil kebijakan memperhatikan segala keinginan masyarakat yang semakin berkembang. Pedoman yang dikeluarkan harus mampu mencerminkan keinginan masyarakat yang berbeda-beda.

B. Persamaan kedudukan di depan hukum

Hukum sangat penting agar pemerintah dapat beroperasi dengan efisien dan melindungi kepentingan rakyatnya. Hukum menetapkan pedoman tindakan yang harus diikuti oleh pemerintah dan mengatur hak serta kewajiban penguasa dan rakyat. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan berlaku bagi semua individu di dalam sistem hukum. Artinya, sistem hukum harus ditegakkan secara objektif dan tepat. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus menghukum mereka yang terbukti bersalah. Untuk mencapai hal ini, diperlukan aparat penegak hukum yang teguh, bijaksana, independen dari pemerintah yang berkuasa, dan berani dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

C. Distribusi pendapatan secara adil

Dalam negara demokrasi, semua sektor, termasuk bidang ekonomi, diatur berdasarkan prinsip keadilan dan kewajaran yang bersifat timbal balik. Semua warga negara mempunyai hak atas penghasilan yang layak.

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia memiliki perbedaan dengan demokrasi di negara lain. Di Indonesia, kita menerapkan "Demokrasi Pancasila," yang berbeda dalam proses pelaksanaannya dibandingkan dengan demokrasi liberal di negara-negara Barat. Pancasila adalah ideologi nasional yang berisi seperangkat nilai-nilai yang dianggap positif, adil, dan bermanfaat bagi bangsa. Nilai-nilai luhur Pancasila, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Demokrasi Pancasila dapat diinterpretasikan dalam berbagai makna, baik yang luas maupun yang lebih sempit.

- 1) Demokrasi Pancasila dalam arti luas maksudnya adalah kedaulatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial.
- 2) Demokrasi Pancasila dalam arti sempit berarti terwujudnya kedaulatan rakyat menurut kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan.

Pengaruh Demokrasi

Demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan yang memberikan suara kepada rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara (Humaira, 2021). Dalam demokrasi, pengaruh rakyat sangatlah penting, dan hal ini mempunyai konsekuensi yang signifikan, baik positif maupun negatif. Hal baiknya adalah demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Hal ini memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka, memilih pemimpin, dan memantau pemerintah. Oleh karena itu, demokrasi mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, demokrasi dapat menumbuhkan keberagaman dan pluralisme dalam masyarakat, memperkaya gagasan dan perspektif yang berbeda.

Namun demokrasi juga mempunyai dampak negatif. Salah satu risikonya adalah keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh isu-isu populer atau pandangan sektarian dan tidak didasarkan pada analisis menyeluruh atau pemikiran yang matang (Herdiansah, 2017). Selain itu, negara demokrasi dapat memperlambat pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi perpecahan dan konflik antar partai politik. Tanpa mekanisme yang baik untuk menjaga stabilitas politik, demokrasi juga berisiko mengganggu stabilitas pemerintahan. Inilah yang disebut dengan krisis, krisis demokrasi, dan merupakan salah satu bentuk dampak negatif ketika demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Krisis Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya berada di tangan rakyat dan mereka mampu mengambil keputusan politik, umumnya melalui pemilihan umum dan partisipasi aktif dalam proses politik. Namun, demokrasi tidak selalu berjalan mulus dan sering kali dihadapkan pada krisis. Krisis demokrasi terjadi ketika prinsip-prinsip demokrasi seperti perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan supremasi hukum terancam atau dilanggar, sehingga mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, terkikisnya hak-hak sipil, polarisasi retorika, dan lain-lain (Sinaga, O, Gandamanam, A, 2023).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi secara demokratis.

Krisis demokrasi adalah suatu kondisi dimana situasi seperti itu terjadi tingginya tingkat populisme (ketidakpuasan) masyarakat terhadap pemerintah dan politik. Kekurangan Pendidikan politik (Damri et al., 2020). Kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah dan politisi rendah; Penurunan jumlah politisi. Kekuatan aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab tersebut semakin meningkat. Prevalensi pemilu, lembaga multilateral, bank sentral dan regulator, representasi yang tidak efisien, dan rezim pemerintahan yang kompleks yang menghindari akuntabilitas dan transparansi (Gagnon, 2014).

Krisis demokrasi dapat memiliki dampak yang merugikan pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Beberapa dampak utama termasuk:

a. Ketidakstabilan Politik

Krisis demokrasi seringkali menimbulkan ketidakstabilan politik, antara lain: Demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, dan konflik rumah tangga. Hal ini mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari dan dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara.

b. Penghambatan Pembangunan

Ketidakstabilan politik akibat krisis demokrasi dapat menghambat pembangunan sosial ekonomi. Investasi asing dan dalam negeri mungkin terhambat dan pemerintah mungkin mengalami kesulitan menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

c. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah dan Institusi Demokratis

Krisis demokrasi dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga demokrasi. Hal ini dapat melemahkan legitimasi pemerintahan terpilih dan menyebabkan masyarakat meragukan nilai demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan.

d. Penurunan Hak Asasi Manusia

Krisis demokrasi sering kali disertai dengan penurunan hak asasi manusia, termasuk penindasan terhadap partai oposisi, jurnalis, dan aktivis. Hal ini dapat menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi mereka yang berani bersuara menentang pemerintah.

e. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan

Krisis dalam demokrasi dapat memperburuk kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Ketimpangan ekonomi dan sosial dapat diperburuk ketika pemerintah gagal menanggapi kebutuhan masyarakat atau melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Salah satu faktor yang mungkin berperan dalam terjadinya krisis demokrasi adalah elit politik suatu negara demokrasi. Para elit politik ini menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk memanipulasi proses politik, mengabaikan aspirasi masyarakat, bahkan mengkonsolidasikan kekuasaannya secara otoriter. Krisis demokrasi akibat ulah elite politik merupakan fenomena global yang merusak fondasi demokrasi. Pada hakikatnya, krisis ini terjadi ketika para elit politik yang seharusnya mewakili rakyat dan menjalankan fungsi pemerintahan demi kepentingan publik, seringkali

terjerumus ke dalam korupsi, manipulasi politik, dan kesenjangan ekonomi. Demokrasi terancam ketika para pemimpin politik gagal memenuhi harapan masyarakat atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Elite Politik

Elite

Elit diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat, termasuk elit pendidikan, elit agama, dan elit institusi. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, elit pada dasarnya merujuk pada elit politik. Menurut David Jarry dan Julia Jarry, asumsi teori elit yang memisahkan elit dari masyarakat biasa merupakan ciri yang tak terelakkan dalam masyarakat modern yang kompleks di mana pun. Menurut mereka, anggapan bahwa rakyatlah yang menjalankan pemerintahan adalah salah. Hal ini memang menunjukkan bagaimana posisi elit ditempatkan pada bidang-bidang yang memiliki kepentingan politik, sekaligus mengakui munculnya elit-elit yang terspesialisasi di berbagai bidang kehidupan (David Jarry dan Julia Jarry dalam Jurdi, 2004: 20).

Terlebih lagi, para ilmuwan sosial telah memelopori dan mengajukan teori-teori tentang elit, terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan politik suatu bangsa dan status sosial individu, baik dalam bidang agama maupun bidang khusus lainnya.

Istilah “elit” pertama kali digunakan pada abad ke-17 untuk barang-barang yang bernilai khusus (kualitas tinggi). Dan istilah elit digunakan untuk menyebut kelompok sosial dalam suatu masyarakat berdasarkan status sosial yang tinggi, seperti pemimpin militer atau bangsawan (Madani, 2023) (Tom B. Bottomore dalam Kartodirdjo, 1990: 24).

Teori klasik mengenai elit menekankan bahwa terdapat kelompok kecil yang memiliki pengaruh dan kekuasaan politik yang signifikan dalam suatu sistem politik. Mosca menyajikan konsep ini dalam karyanya yang terkenal, "The Ruling Class". Dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelas penduduk: kelas penguasa dan kelas yang didominasi. Kelompok pertama selalu berjumlah sedikit dan mengendalikan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, serta menikmati keuntungan yang diperoleh dari kekuasaan, sementara kelompok kedua jauh lebih besar dan diatur oleh kelompok pertama (sastroatomojo) Will, 1995 : 147).

Sementara itu, Mills juga mengajukan definisi elite. Artinya, mereka yang menduduki posisi puncak dalam institusi ekonomi, militer, dan politik membentuk elit kekuasaan. Mereka bersatu dan terintegrasi dengan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi struktur dasar dan arah masyarakat. Menurut Mills, elite kekuasaan bukanlah kelompok yang tertutup atau statis dengan kebijakan yang sepenuhnya terpadu (Johnson, 1986, 1974).

Vilfredo Pareto menjelaskan pengertian elit dengan cara yang berbeda-beda, namun yang dimaksud sebenarnya adalah bahwa setiap individu di setiap kelas sosial mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Struktur sosial seringkali terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelas bawah, yaitu sekelompok massa yang bukan elit namun mempunyai pengaruh terhadap pemerintah. Kelompok elite yang terdiri dari dua kelas atas: elite penguasa dan elite non penguasa (Robert D. Putnam, Mas'ood, 1982: 71).

Keller (Jurdi, 2004) juga mengajukan konsep elit. Pertama, elit mengacu pada sejumlah kecil orang yang ditakdirkan untuk mengabdikan pada sesuatu. Meningkatkan rasa persatuan dengan cara yang memiliki nilai sosial. Elit adalah kelompok minoritas yang efisien dan bertanggung jawab, yang dapat mengamankan kepentingan mereka secara efektif sambil tetap memperhatikan orang lain yang dipengaruhi oleh kelompok elit tersebut. Elit merupakan posisi yang tinggi dalam masyarakat, entah

dalam organisasi sosial, politik, ekonomi, agama, atau memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu, dan berperan dalam struktur sosial yang luas. dalam organisasi ekonomi, pemerintah, dll. akan segera muncul. Lebih lanjut Nazaruddin Syamsuddin menjelaskan pengertian elit. Menurutnya, aktor politik teratas adalah para elite. Semua elit yang terlibat dalam mempengaruhi proses politik dan membentuk kepentingannya sendiri dapat disebut elit (Jurdi, 2004: 23).

Terkait dengan konsep elit, muncul pendapat bahwa kelas menengah merupakan bagian dari masyarakat elit karena mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik masyarakat. Namun, Mills percaya bahwa elit kekuasaan adalah kelompok masyarakat yang sangat berbeda dari kelas menengah, dan mereka memegang posisi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Bahkan, ia menganggap keberagaman elite yang ada dalam masyarakat modern sebagai konstituen sosial yang memiliki asal usul yang sama (Poloma, 2000: 340), sehingga menyebutnya sebagai kelas menengah yang umumnya muncul dari berbagai strata sosial yang berbeda. menyamakannya dengan kelompok politik dalam masyarakat (Jurdi, 2004:22).

Pengejaran dan pemeliharaan kekuasaan sendiri telah menjadi ciri khas elit penguasa. Hal ini terjadi terkait dengan kepentingan “informal” elit individu. Sekalipun mereka “secara tidak resmi” berselisih satu sama lain, para elit politik sebenarnya berjuang untuk kepentingan “resmi” yang sama, yaitu, seperti yang dikatakan Mills, semua elit menginvestasikan energi mereka untuk kepentingan yang sama. dan kemudian satu sama lain. tentang kebijakan mereka. Oleh karena itu, para elit terus berupaya menciptakan berbagai lembaga peningkatan kesadaran, seperti lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan, bahkan lembaga keagamaan, untuk mendukung kepentingan mereka (Maliki, 2004).

Politik

Politik merupakan suatu bentuk interaksi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang mempengaruhi fenomena politik. Proses politik adalah suatu proses interaksi antara individu, individu dengan kelompok, atau kelompok yang menghasilkan produk politik. Di sini mekanisme interaksinya bertumpu pada penerapan sistem politik yang dilaksanakan dalam struktur politik berupa musyawarah mufakat, otoritarianisme, melalui pemilu dan kudeta (Setiadi dan Kolip, 2013: 130).

Bagi Miriam Budialjo, politik adalah upaya untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat dan mengantarkan masyarakat hidup rukun. Politik juga dapat dilihat sebagai upaya manusia untuk membangun tatanan sosial yang baik. Politik diposisikan sebagai forum bersama dimana setiap individu berupaya meningkatkan bakat dan kehidupannya. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin mencapai kesejahteraan pribadi dengan menggunakan sumber daya yang ada dan bersusah payah membujuk orang lain agar menerima pendapat dan aspirasinya, maka ia sedang melakukan aktivitas politik (Areza et al., 2023) (Sandi, 2016).

Politik adalah hubungan antara pemerintah, hukum, undang-undang, kebijakan, dan peraturan. Harold J. Laski (Budiardjo, 1993) mengartikan politik sebagai “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.” Artinya, siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Bisa berupa sekelompok orang yang berpartisipasi dalam suatu pemilu, seorang pejabat yang menjelaskan visi dan misi politik partainya, atau sekelompok elit politik yang mendiskusikannya. Dalam aktivitas politik, partai-partai terlibat dalam interaksi politik.

Selain itu, politik tidak hanya berkaitan dengan negara, karena konflik, peraturan, regulasi, manifestasi, dan masalah sosial tertentu bersifat atau dapat bersifat politis. Deutsch (Sandy, 2016) menyebut hal ini sebagai “politisasi.” Politisasi adalah aktivitas menjadikan sesuatu bersifat politis, atau meningkatkan kesadaran tentang aspek politik dari berbagai masalah kehidupan dan sosial. Ketika pemerintah terlibat dalam penyelesaian permasalahan sosial sebagai suatu aktivitas politik, maka

permasalahan sosial menjadi permasalahan politik. Begitu pula dengan upaya menghalangi atau menolak upaya pemerintah untuk turut serta menyelesaikan atau mengatasi permasalahan disebut dengan kegiatan politik.

Elit politik Indonesia telah menjadi subyek perdebatan sengit dalam konteks demokrasi di negara ini. Elit politik adalah sekelompok individu atau partai politik yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Mereka seringkali menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok, seringkali merugikan kepentingan umum. Seperti yang ditunjukkan oleh Mas'ood dan Colin Mac Andrews²², ketika mempelajari elit politik, yang terbaik adalah mendefinisikan kekuasaan dalam kaitannya dengan kekuasaan atas hasil. Oleh karena itu, kekuasaan adalah kemungkinan mempengaruhi kebijakan dan aktivitas suatu negara, atau (dalam terminologi teori sistem) kemungkinan mempengaruhi distribusi nilai secara signifikan. Bahkan pengambil keputusan yang paling berkuasa pun harus mempertimbangkan reaksi orang lain.

Salah satu penyebab penyalahgunaan hak demokrasi oleh elit politik adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya politik. Kekuasaan dan pengaruh elit politik berarti mereka mempunyai akses lebih besar terhadap sumber daya politik seperti dana kampanye dan media massa. Hal ini mengganggu keseimbangan persaingan politik, sehingga menyulitkan partai dan kandidat yang kurang mendapat dukungan elit politik untuk bersaing dalam proses demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi terdistorsi karena hanya sejumlah kecil elit politik yang mampu berpartisipasi secara efektif, sementara sebagian lainnya terpinggirkan.

Selain itu, penyalahgunaan hak demokrasi oleh elit politik juga tercermin dalam praktik korupsi. Banyak elit politik di Indonesia yang terlibat dalam praktik korupsi yang berdampak negatif terhadap bangsa dan masyarakat. Mereka menggunakan posisi politik mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti proyek infrastruktur yang menguntungkan dan kontrak bisnis yang menguntungkan. Praktik korupsi ini tidak hanya berdampak negatif terhadap keuangan negara, namun juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia terancam oleh praktik korupsi para elit politik yang menguasai kebijakan dan sumber daya negara.

Dampak penyalahgunaan hak demokrasi yang dilakukan oleh elit politik sangat merugikan masyarakat Indonesia. Pertama, kesenjangan akses terhadap sumber daya politik berarti bahwa suara dan aspirasi mayoritas masyarakat tidak terwakili secara memadai dalam proses politik. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan politik dan keterasingan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa sistem politik tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya partisipasi dalam pemilu dan proses politik lainnya, sehingga mengancam stabilitas demokrasi itu sendiri.

Dampak lain dari penyalahgunaan hak demokrasi yang dilakukan elit politik adalah rusaknya kesehatan lembaga-lembaga negara. Korupsi dan tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh elit politik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Hal ini dapat mengganggu tatanan demokrasi dan menghambat upaya membangun negara berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, penyalahgunaan hak demokrasi oleh elit politik juga berdampak negatif terhadap pembangunan sosial-ekonomi Indonesia. Dana yang seharusnya digunakan untuk investasi infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi para elit politik. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menghambat upaya mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

Mengatasi krisis demokrasi yang disebabkan oleh peran negatif elite politik, memerlukan serangkaian tindakan yang hati-hati dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini:

1. Peningkatan Kesadaran Publik

Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah krisis demokrasi dan peran elit politik dalam masalah ini. Kampanye pendidikan dan informasi yang transparan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi politik yang aktif dan beragam.

2. Reformasi Sistem Pemilihan

Sistem pemilu yang transparan dan adil sangatlah penting. Memperkenalkan metode pemungutan suara yang lebih inklusif, seperti perwakilan proporsional dan pemungutan suara alternatif, dapat mengurangi dominasi elit politik dan memberikan suara yang lebih besar kepada berbagai kelompok di masyarakat.

3. Pemberantasan Korupsi

Korupsi adalah masalah serius dalam politik, sering kali menimpa elit politik. Pembentukan lembaga antikorupsi yang independen dan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang terlibat korupsi dapat membantu menghilangkan praktik-praktik dalam sistem politik yang melemahkan demokrasi.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Langkah penting adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan warga negara dan dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil terhadap informasi dan sumber daya yang mereka perlukan untuk berpartisipasi dalam politik.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah merupakan langkah penting. Hal ini termasuk menegakkan undang-undang yang memaksa elit politik untuk mengungkapkan sumber pendapatan mereka dan memantau penggunaan dana publik.

6. Media Independen dan Etis

Mendukung media yang independen dan beretika sangat penting untuk menjaga checks and balances dalam politik. Kita harus mendukung perlindungan kebebasan pers dan mengakhiri penyalahgunaan media oleh elit politik.

7. Partisipasi Politik yang Inklusif

Penting untuk memberikan platform bagi beragam kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan kurang terwakili, untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini dapat mengarah pada hubungan kekuasaan yang lebih seimbang dalam keterwakilan politik.

8. Pendidikan Politik yang Lebih Baik

Memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah membantu memperdalam pemahaman tentang proses politik dan pentingnya partisipasi.

9. Reformasi Hukum Pemilu

Undang-undang pemilu mungkin perlu direvisi untuk menghilangkan praktik-praktik yang mendukung dominasi elit politik, seperti peraturan keuangan kampanye dan batasan masa jabatan.

10. Kolaborasi Internasional

Penting juga untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan negara-negara lain untuk mendorong demokrasi dan memberantas korupsi, karena permasalahan demokrasi seringkali

tidak terbatas pada batas negara saja. Tantangannya adalah mengatasi krisis demokrasi yang disebabkan oleh elite politik. Ini rumit dan memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat. Langkah-langkah ini bersifat wajib dilaksanakan secara hati-hati dan direformasi secara perlahan agar demokrasi dapat mencapai kesehatan yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.

SIMPULAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat atau pemegang kekuasaan yang dipilih oleh rakyat. Arti demokrasi dapat bervariasi, tetapi intinya adalah partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, persamaan di depan hukum, dan partisipasi yang bebas.

Namun, elite politik seringkali memanfaatkan posisi dan kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan kelompok, seringkali dengan merugikan kepentingan masyarakat umum. Penyalahgunaan hak berdemokrasi oleh elite politik menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya politik, praktik korupsi, dan kerusakan integritas lembaga-lembaga negara. Ini mengancam stabilitas demokrasi dan pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengawasi tindakan elite politik, menuntut akuntabilitas mereka, dan aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Areza, T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. (2023). Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(2).
- Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2022). Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia di Pulau Jawa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 4(1), 54–70.
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Amalia, L. S., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2018). *Personalisasi partai politik di Indonesia era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damanik, D., & Lubis, I. (2022). Analisis Pengaruh Demokrasi, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 503–515.
- Damri, M. P., Putra, F. E., & Kom, M. I. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. Prenada Media.
- Gunawan, W. (2019). Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 2(02).
- Harahap, I. H. (2017). *Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi identitas dalam kompetisi pemilu di Indonesia pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.
- Humaira, A. (2021). *Konsep Negara Demokrasi*.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., & Ltubing, J. M. S. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business*, 1(1), 59–64.
- Kasih, E. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 49–68.
- Madani, A. (2023). *Konsep Elite Politik: Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama pada Pemilihan Kepala Daerah*. Malang; PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- RAFLI, A. (2022). *Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2020*.
- Rofidah, L. (2017). Dekadensi Moral Elit Politik Sebagai Ancaman Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Integrative International Relations*, 3(2), 53–62.
- Sinaga, O, Gandamanam, A. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan, Tim Dosen*. CV. Harapan Cerdas.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Syahdiono, F. (2022). Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 1–20.
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).